

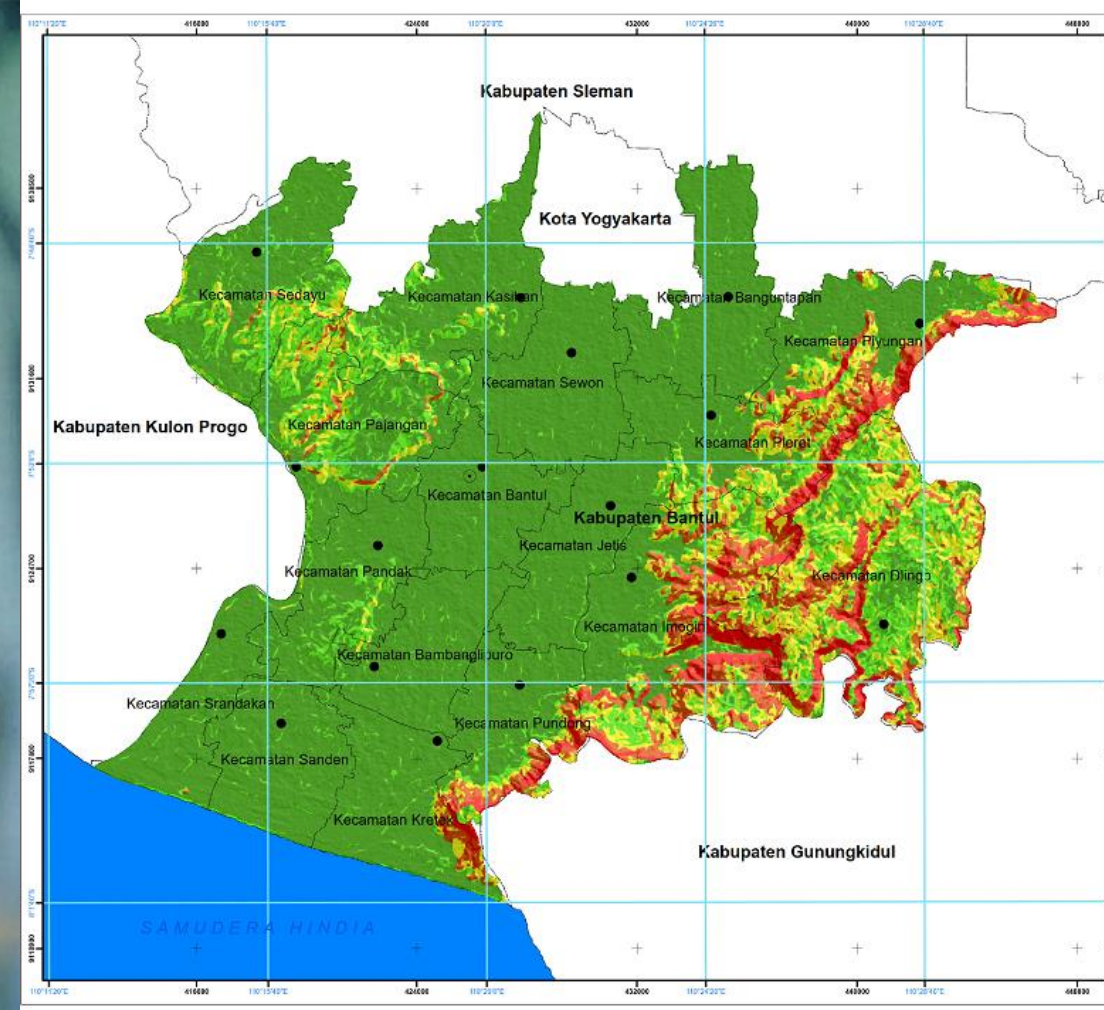
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023

PROJOTAMANSARI

DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
2022

VISI BUPATI BANTUL :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis,
Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945
Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”



**PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA TERPADU
DAN PENCAPAIAN BANTUL SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK,
RAMAH PEREMPUAN, LANSIA DAN DIFABEL.**



PENDAHULUAN
OVER VIEW DINAS SOSIAL

Perda
Nomor 5
Tahun 2021

- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Perbup
Nomor 91
Tahun 2021

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL

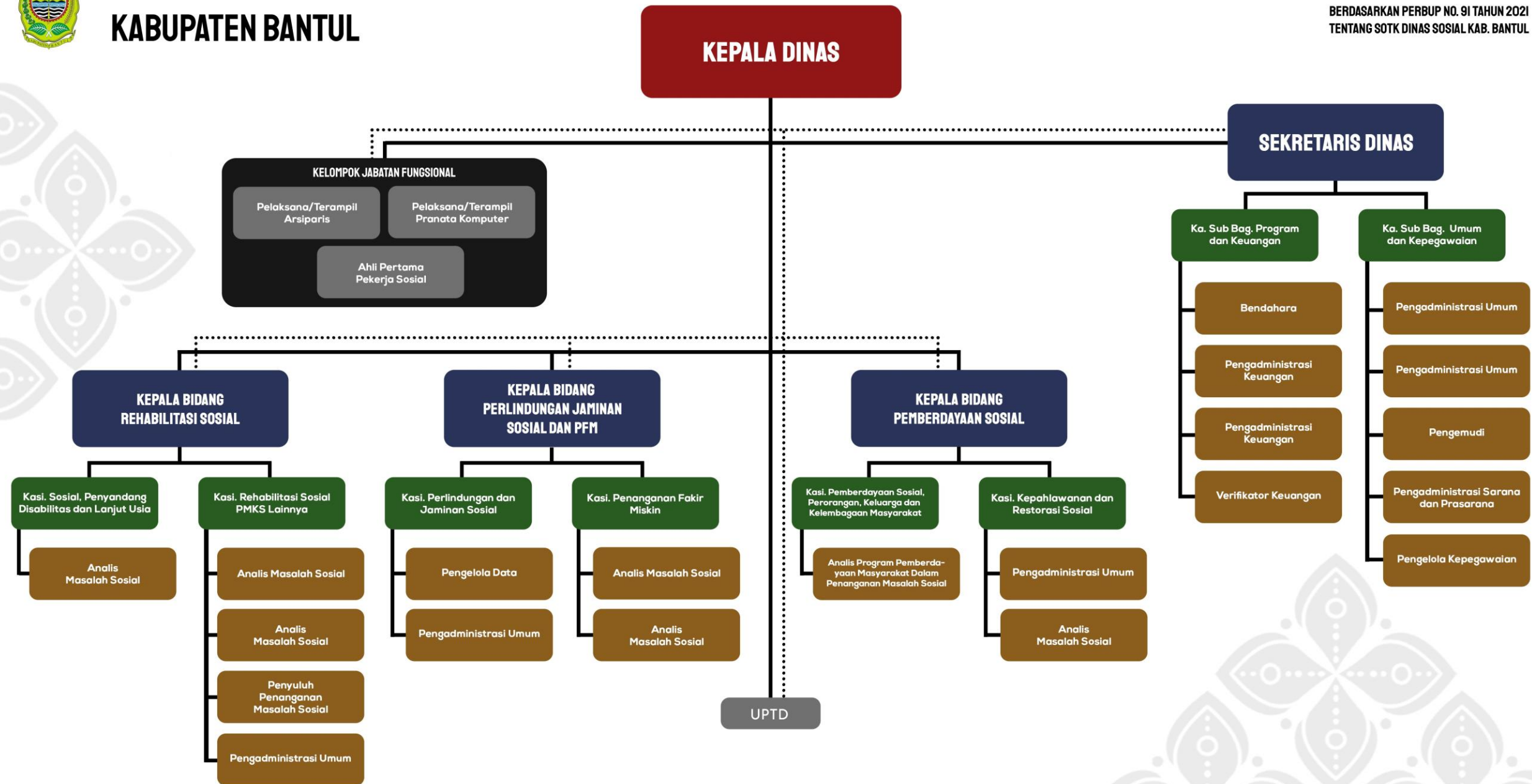
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

SALINAN

DINAS TIPE B







**IMPLEMENTASI SAKIP
TAHUN 2023 DINAS SOSIAL**

LANDASAN IMPLEMENTASI SAKIP

Implementasi SAKIP



PERENCANAAN



PENGUKURAN



PELAPORAN



EVALUASI



CAPAIAN

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan SAKIP

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Pengelolaan Data Kinerja
5. Pelaporan Kinerja

Petunjuk teknis

1. Perjanjian Kinerja
2. Pelaporan Kinerja

Implementasi SAKIP pada DINAS SOSIAL



PERENCANAAN

1. Dinsos telah menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja
2. Dokumen telah selaras dengan RPJMD dan antar dokumen perencanaan
3. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
2. Kegiatan/aksi untuk mencapai target kinerja telah dilakukan
3. Telah dilakukan reviu dokumen perencanaan oleh Inspektorat



PENGUKURAN

1. Dinsos telah menyusun IKU sebagai ukuran kinerja secara formal serta sebagai mekanisme pengukuran kinerja organisasi dan individu (proses dan jadwal)
2. Ukuran kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi
3. Telah menggunakan IT dalam proses pengukuran kinerja (ESAKIP-ROPK)
4. Waktu pengukuran telah dilakukan secara tepat waktu dan data kinerja dapat diandalkan
5. Pemantauan realisasi kegiatan/aksi pencapaian target kinerja
6. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan perbaikan manajemen
7. *Reward and Punishment*



PELAPORAN

1. Laporan kinerja telah memuat :
 - Capaian kinerja yang diperjanjikan
 - Analisis penggunaan sumber daya
 - Perbandingan capaian kinerja (tahun sebelumnya, target Renstra)
 - Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
 - Identifikasi masalah dan rencana perbaikan
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Keandalan data kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan organisasi



EVALUASI

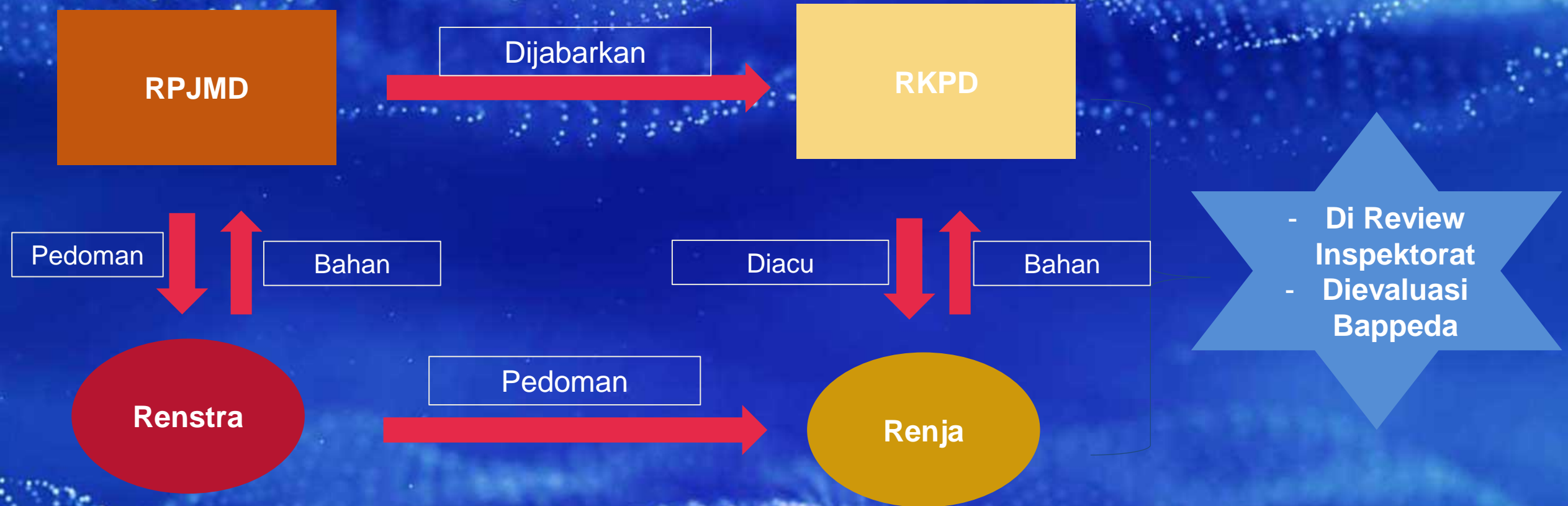
1. Kemajuan pencapaian kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran)
2. Realisasi kegiatan/aksi untuk mencapai target kinerja
3. Proses, hasil, dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan
4. Rencana perbaikan pelaksanaan kegiatan dan kinerja
5. Rekomendasi keberlanjutan kegiatan
6. Kebijakan pimpinan terhadap hasil evaluasi atau tindak lanjut hasil evaluasi



CAPAIAN

Hasil pengukuran kinerja IKU Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah 100%.

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN



RPJMD
(KINERJA LEVEL PEMDA)



RENSTRA OPD
(KINERJA LEVEL OPD)

POHON KINERJA

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”

Misi

Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

Tujuan

“Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat”

Sasaran

“Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)”

Indikator

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

Sasaran

“Meningkatnya penanganan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

Program 1 :

“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota”

Indikator :

1. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
2. Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

Program 2 :

“PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL”

Indikator :

Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani

Program 3 :

“PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSPROGRAM REHABILITASI SOSIAL”

Indikator :

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

Program 4 :

“PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL”

Indikator :

Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial

Program 5 :

“PROGRAM PENANGANAN BENCANA”

Indikator :

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten

Program 6 :

“PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN”

Indikator :

Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial

PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES DINSOS

Sasaran : Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS



ISU STRATEGIS



Kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 12,27% jadi perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi.



Anak terlantar. Jumlah anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial yaitu 574 anak.



Penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan ketrampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.



Lanjut Usia terlantar. Usia harapan hidup lanjut usia di Kabupaten Bantul masih banyaknya lanjut usia terlantar. padahal penanganan lanjut usia adalah masa depan kita.

TINDAKLANJUT LHE SAKIP YANG DITERBITKAN INSPEKTORAT

REKOMENDASI LHE	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS
Agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjaniikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional	Penyusunan Laporan Kinerja akan disusun Kembali pada awal tahun 2024 untuk meningkat kualitasnya akan mengikuti Bimtek penyusunan Laporan Kinerja yang di selenggrakan setiap tahunnya. Selanjutnya LKJ akan menyajikan data yang memadai terkait akuntabilitas kinerja dari permasalahan, faktor penghambat dan pendorong, startegi kedepan dan penyandingan data nasional dan data tegional sebagai pembanding	1 Dokumen	Januari 2024	Belum Proses



**CAPAIAN KINERJA SASARAN
DAN INDICATOR KINERJA UTAMA**

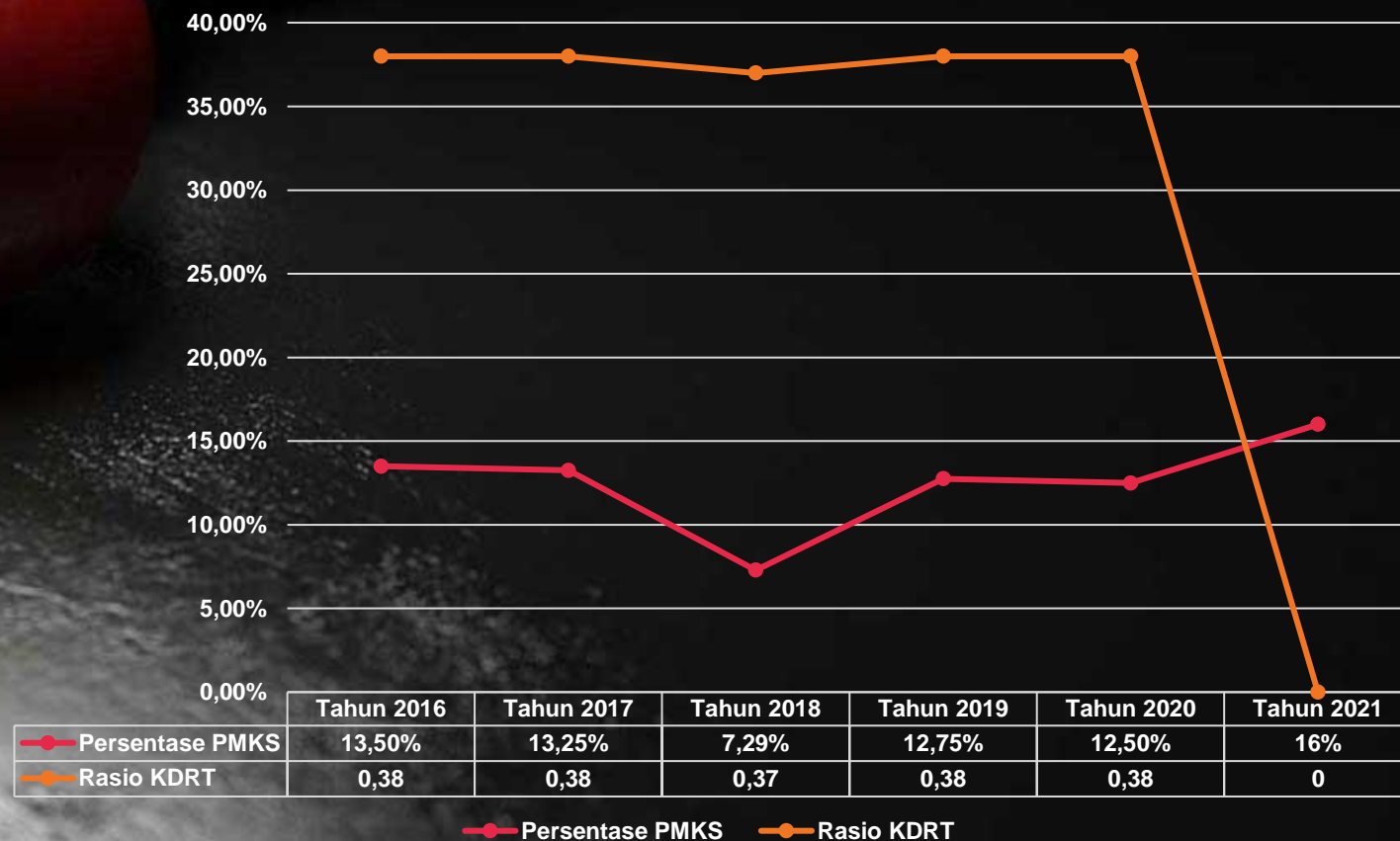
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

IKU TAHUN 2022 :

**Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang dilayani
dan ditangani**

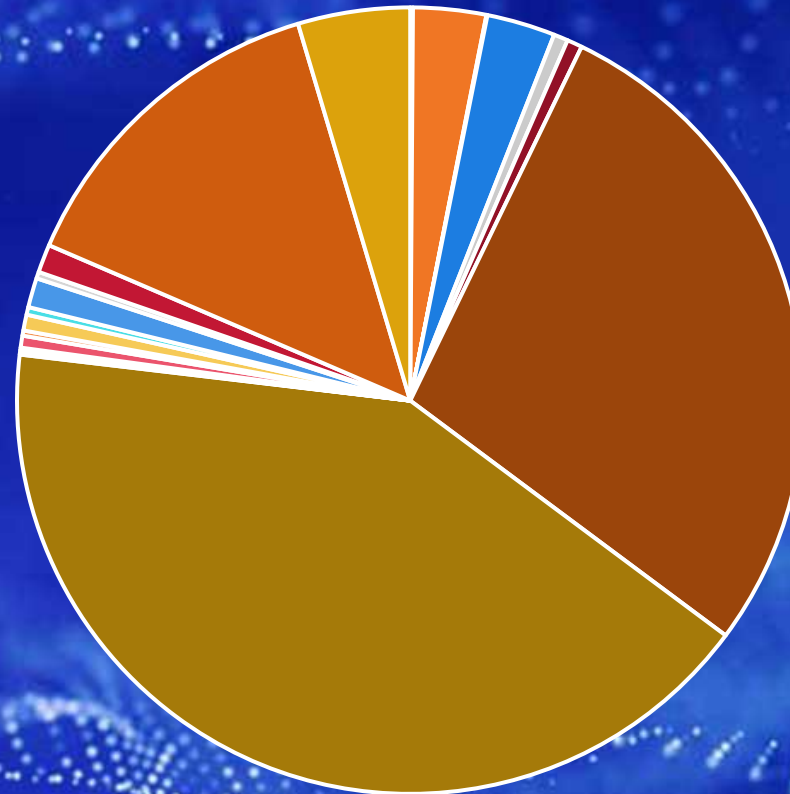
100%

IKU 2016 s.d 2021



No	Jenis PPKS	Tahun 2022
1	Anak Balita Terlantar	21
2	Anak Terlantar	574
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	6
4	Anak Jalanan	2
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	539
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	113
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	120
8	Lanjut Usia Terlantar	5363
9	Penyandang Cacat/disabilitas	7983
10	Tuna Susila	9
11	Gelandangan	26
12	Pengemis	19
13	Pemulung	94
14	Korban Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	41
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	125
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	60
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	232
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	52
21	Korban Bencana Alam	222
22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2667
24	Fakir Miskin #Program pkh	54539
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	882
26	Komunitas Adat Terpencil	0
	Jumlah	73689

REKAP DATA PPKS TAHUN 2022

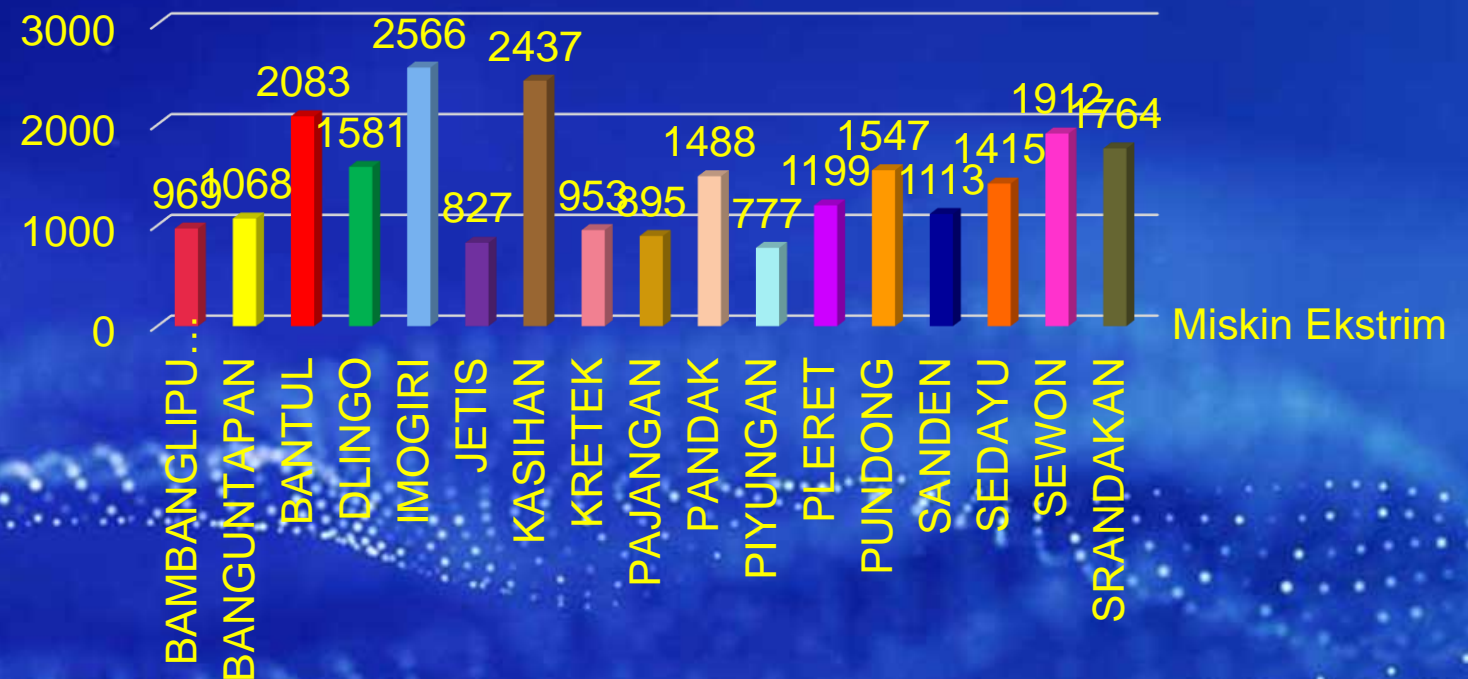


- Anak Balita Terlantar
- Anak Terlantar
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Anak Jalanan
- Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
- Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- Lanjut Usia Terlantar
- Penyandang Cacat/disabilitas
- Tuna Susila
- Gelandangan
- Pengemis
- Pemulung
- Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Korban Tindak Kekerasan
- Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- Korban Bencana Alam
- Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
- Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

DATA MISKIN EKSTRIM HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Kapanewon	Miskin Ekstrim
BAMBANGLIPURO	969
BANGUNTAPAN	1068
BANTUL	2083
DLINGO	1581
IMOGIRI	2566
JETIS	827
KASIHAN	2437
KRETEK	953
PAJANGAN	895
PANDAK	1488
PIYUNGAN	777
PLERET	1199
PUNDONG	1547
SANDEN	1113
SEDAYU	1415
SEWON	1912
SRANDAKAN	1764
TOTAL	24594

Rekap Miskin Ekstrim Bantul 2022



CAPAIAN UHC 2022



CAKUPAN KEPESERTAAN DI YOGYAKARTA S.D. DESEMBER 2022

NO	DATI 2	URAIAN	PBI APBN	PBPU PEMDA	PPU	BP	PBPU	TOTAL JKN	JML PENDUDUK	% PESERTA	KET UHC
1	Bantul	Peserta	497.322	59.437	251.139	30.661	84.043	922.602	957.352	96,37%	UHC > 95%
		%	54%	6%	27%	3%	9%				
2	Gunungkidul	Peserta	514.470	85.630	115.945	15.479	36.135	767.659	774.855	99,07%	UHC > 95%
		%	67%	11%	15%	2%	5%				
3	Yogyakarta	Peserta	115.637	87.325	132.913	21.012	55.583	412.470	412.589	99,97%	UHC > 95%
		%	28%	21%	32%	5%	13%				
TOTAL KC YOGYAKARTA			1.127.429	232.392	499.997	67.152	175.761	2.102.731	2.144.796	98,04%	UHC > 95%

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM
ESELON III**



CAPAIAN PROGRAM 2022

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2022	
		Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 persen	82 persen
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 persen	70 persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	60 Persen
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-	75%	75%
	nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	55 Persen
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		

A close-up photograph of a hand holding a black pen, poised to write on a white document. The scene is dramatically lit from the left, creating a strong highlight on the paper and the hand. Overlaid on the image is the text 'PERMASALAHAN 2022' in a bold, red, sans-serif font. The text is slightly tilted and has a subtle reflection effect below it.

PERMASALAHAN 2022

Permasalahan dalam penanganan kesejahteraan sosial



DATA
MISKIN

1. TINGGINYA ANGKA
KEMISKINAN

2. FLUKTUASI JUMLAH PPKS
SEHINGGA MENYULITKAN
PENENTUAN TARGET KINERJA
PROGRAM

Integrasi
layanan
rehabilitasi
Sosial &
Verivali
data
PPKS



Memiliki
Banyak
Lembaga
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial namun
belum tersinergi
pada Sasaran
yang sama

3. BELUM TERBANGUNNYA
SINERGI STAKEHOLDER DALAM
PENANGANAN KEMISKINAN
DAN PPKS

A close-up photograph of a hand holding a black pen, writing on a white document. The lighting is dramatic, with a strong light source from the left creating a bright glow and casting shadows. The text 'SOLUSI & INOVASI' is overlaid in a bold, green, sans-serif font with a thin red outline. The text is positioned horizontally across the middle of the image, partially overlapping the hand and the document. The background is dark and out of focus.

SOLUSI & INOVASI

1. Pendataan dengan IKS

“
Pentingnya mengetahui pembobotan kesejahteraan masy agar tepat sasaran dalam memberikan program
”

Wilayah Kecamatan dan Desa	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sangat Miskin		Miskin		Rentan Miskin		Mampu	
			KK	jiwa	KK	Jiwa	KK	jiwa	KK	Jiwa
010. SRANDAKAN	1.069	2.958	3	9	275	628	745	2.187	43	129
001. PONCOSARI	646	1.810	1	5	120	255	499	1.475	25	74
002. TRIMURTI	423	1.148	2	4	155	373	246	712	18	55
020. SANDEN	2.071	5.654	9	16	458	1.028	1.380	3.963	215	619
001. GADINGSARI	517	1.408	1	1	120	278	354	1.002	38	119
002. GADINGHARJO	881	2.361	4	11	184	394	601	1.698	88	240
003. SRIGADING	354	931	3	3	86	171	219	630	46	127
004. MURTIGADING	319	954	1	1	68	185	206	633	43	133
030. KRETEK	3.497	9.307	6	11	533	1.237	2.611	6.971	330	1.040

2022

Awal dilaksanakan pembobotan kesejahteraan berdasarkan Indikator Kesejahteraan dengan aplikasi sidamesra tercapai 49 ribu KK yang telah di kategori (sangat miskin, miskin, rentan miskin, mampu)

2023

Target Pelaksanaan seluruh penduduk Kabupaten Bantul

2024

Penanganan kemiskinan berdasarkan grade pembobotan kesejahteraan sesuai bnba IKS sidamesra

2. JARING PENGAMAN SOSIAL

“
Banyaknya permasalahan urusan sosial dan rehabilitasinya yang belum tercover dalam jaminan & bantuan
”



2022

Membuat Regulasi Perbub Jaring Pengaman Sosial – meringankan beban masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan serta tidak dapat direncanakan sebelumnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial yang tidak terencana;



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL



2023

Pelaksanaan Rehabilitasi social bagi masyarakat yang mengalami kedaruratan social tidak terencana



2024

Penyempurnaan Jaring Pengaman Sosial

3. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH KESOS

“

Mengintegrasikan instansi terkait dalam penanganan rehabilitasi yang meliputi Kesehatan, sosial, Pendidikan dan fasilitas kependudukan serta jaminan kerja dlm 1 unit

”



2022

Pelaksanaan Rehabilitasi social dilaksanakan di Shelter Kesejahteraan Sosial dengan anggaran APBD dan JPS



2023

Pembahasan Raperbub UPTD Bersama stakeholder dan peningkatan kapasitas pelayanan di Shelter Kesos



2024

Terbentuknya UPTD Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan spesifikasi ahli teknis dari instansi terkait – menjadi Unit Daerah pelaksanaan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



4. SINERGITAS LKS PADA PENANGANAN PPKS

“

Lembaga Kesejahteraan Sosial ikut serta dalam pendampingan di masyarakat akan di sinergikan sesuai data PPKS dan IKS

”



2022

Pelaksanaan Kegiatan LKS/A berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat Bantul secara Umum



2023

Pelaksanaan Kegiatan LKS /A terkontrol dengan pendataan penanganan PPKS yang ditangani



2024

Sasaran Penanganan LKS/A terintegrasi dengan Data PPKS dan IKS yang ada pada Dinas Sosial agar tepat Sasaran secara pemberian program terintegrasi



TERIMAKASIH

NEGARA 5ADJR